

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri feminis (Feminist Foreign Policy/FFP) yang diadopsi oleh Pemerintah Meksiko pada tahun 2020 merupakan langkah transformatif dalam merespons tingginya kerentanan perempuan migran terhadap perdagangan manusia (*trafficking in persons*), khususnya pada masa pemerintahan Presiden Andrés Manuel López Obrador (AMLO) periode 2018–2023. Kebijakan ini tidak hanya bersifat simbolik atau normatif, melainkan dilandasi oleh kebutuhan domestik yang nyata, termasuk tingginya tingkat femisida, ketimpangan gender struktural, dan tekanan internasional serta nasional untuk mereformasi sistem migrasi dan hak asasi manusia.

FFP Meksiko secara eksplisit mengintegrasikan pendekatan berbasis gender dalam diplomasi, perlindungan migran, dan kerja sama internasional. Dalam konteks penyelesaian kasus perdagangan perempuan migran, FFP menjadi kerangka yang memungkinkan terjadinya harmonisasi antara kebijakan luar negeri dan kebijakan migrasi domestik. Hal ini tercermin melalui pembentukan protokol identifikasi korban trafficking yang responsif gender, pelatihan aparat lintas sektor (INM, SEGOB, SRE), penyediaan visa kemanusiaan bagi korban, serta kolaborasi aktif dengan organisasi internasional seperti IOM dan UN Women.

Keberhasilan pelaksanaan FFP sangat bergantung pada keterlibatan dan koordinasi **aktor-aktor domestik**, baik dari sektor pemerintah seperti SRE, INM, INMUJERES, dan Kejaksaan Khusus, maupun dari sektor non-pemerintah seperti LSM feminis dan organisasi HAM. Dinamika tarik-menarik antara orientasi keamanan (pengetatan perbatasan) dan perlindungan hak asasi menjadi tantangan utama dalam implementasi FFP secara konsisten. Namun, kebijakan ini telah membuka ruang institusional bagi pendekatan feminis dalam penanganan migrasi dan trafficking, khususnya di daerah rawan seperti Tapachula.